



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGATUR JALAN TOL

Gedung Bina Marga Lantai 2 Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7258063, 7257126 Fax. (021) 7257126

Nomor : BM.07.02 - P / 237
Sifat :
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : **Peningkatan Kinerja Konsultan Pengendali
Mutu Independen dalam Pengendalian Kualitas
Konstruksi Jalan Tol**

Jakarta, 22 Mei 2019

Kepada Yth. :
**Direktur Utama Badan Usaha Jalan Tol
(Daftar Terlampir)**
di
Tempat

Sehubungan dengan hasil pembahasan *Working Group* yang dilaksanakan antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dengan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), bersama ini kami sampaikan tindak lanjut dalam topik Peningkatan Kinerja Konsultan Pengendali Mutu Independen dalam Pengendalian Kualitas Konstruksi Jalan Tol sebagai berikut:

1. Keberadaan konsultan Pengendali Mutu Independen (PMI) adalah sangat diperlukan di lapangan sebagai perpanjangan tangan BPJT dalam melakukan fungsi pengawasan atas pemenuhan mutu sesuai spesifikasi teknis serta penyelesaian jadwal konstruksi sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan hasil evaluasi dan pembahasan, guna lebih meningkatkan kinerja konsultan PMI dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, diminta kepada BUJT untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pengadaan penyedia jasa konsultansi PMI agar dilakukan secara terbuka melalui tahapan Pra Kualifikasi (azas terbuka dan transparan), sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan. Adapun pelaksanaannya diharapkan dapat dilaksanakan di awal atau bersamaan dengan proses pengadaan jasa kontraktor dan konsultan supervisi sehingga dapat dilibatkan dalam pembahasan awal (*Pre Construction Meeting*);
 - b. Lingkup, tugas, fungsi dan tanggung jawab/kewenangan Konsultan PMI untuk selanjutnya agar dicantumkan dalam kontrak Konsultan Supervisi dan Kontraktor Pelaksana. Bagi ruas jalan tol yang tengah berjalan pelaksanaan konstruksinya, BUJT diminta untuk melakukan amandemen kontrak konsultan supervisi dan kontrak kontraktor pelaksana;
 - c. Dalam hal terjadi perubahan desain dan perubahan lingkup konstruksi di lapangan, sebagai bentuk keterlibatan dalam tahapan dimaksud Konsultan PMI diminta untuk melakukan evaluasi serta turut menandatangani Berita Acara (BA) Pemeriksaan Rencana Teknik Akhir (RTA) dan BA Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi;

- d. Sumber pembiayaan Konsultan PMI tetap merupakan bagian dari biaya investasi perusahaan jalan tol, dan komponen besaran biaya jasa konsultasi tersebut akan dicantumkan dalam rincian biaya Investasi dalam Perjanjian Perusahaan jalan Tol (PPJT). BPJT akan melakukan pemeriksaan atas substansi pelaporan PMI yang disampaikan, dalam hal tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, BPJT dapat meminta BUJT untuk melakukan penundaan penyampaian remunerasi kepada Tenaga Ahli;
 - e. Dalam hal terdapat jasa konsultasi PMI yang merangkap di dalam jasa konsultasi manajemen konstruksi dan/atau jasa konsultasi supervisi, diminta kepada BUJT untuk melakukan pemisahan kontrak antara konsultan PMI dengan konsultan manajemen konstruksi atau konsultan supervisi sehingga jasa konsultan PMI dapat berdiri sendiri (organisasi dan kontrak terpisah).
3. Untuk selanjutnya BUJT agar menyampaikan pelaporan atas tindak lanjut hal-hal tersebut di atas kepada BPJT.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Kepala BPJT**
Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc
NIP. 19650603 199003 1 002

Tembusan Yth.:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Direktur Jenderal Bina Marga;
3. Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Ditjen Bina Marga.

Lampiran surat Kepala BPJT

Nomor : BM.04.02 -P/ 237

Tanggal : 22 Mei 2019

1. Ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia;
2. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk;
3. Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero);
4. Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada;
5. Direktur Utama PT Nusantara Infrastruktur;
6. Direktur Utama PT Waskita Tol Road;
7. Direktur Utama PT Astra Infra Tol Road;
8. Direktur Utama PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri;
9. Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi;
10. Direktur Utama PT Jasamarga Pandaan Malang;
11. Direktur Utama PT Jasamarga Balikpapan Samarinda;
12. Direktur Utama PT Jasamarga Manado Bitung;
13. Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek;
14. Direktur Utama PT Jasamarga Japek Selatan;
15. Direktur Utama PT Jasamarga Kunciran Cengkareng;
16. Direktur Utama PT Marga Trans Nusantara;
17. Direktur Utama PT Cinere Serpong Jaya;
18. Direktur Utama PT Trans Lingkar Kita Jaya;
19. Direktur Utama PT Cimanggis Cibitung Tollways;
20. Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways;
21. Direktur Utama PT Kresna Kusuma Dyandra Marga;
22. Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar;
23. Direktur Utama PT Hutama Marga Waskita;
24. Direktur Utama PT Waskita Sriwijaya Tol;
25. Direktur Utama PT Waskita Bumi Wira;
26. Direktur Utama PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol;
27. Direktur Utama PT Trans Jabar Tol;
28. Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol;
29. Direktur Utama PT Citra Waspphutowa;
30. Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development;
31. Direktur Utama PT Trans Bumi Serbaraja;
32. Direktur Utama PT Bosowa Marga Nusantara;
33. Direktur Utama PT Jalan Tol Seksi Empat;
34. Direktur Utama PT Wijaya Karya Serang Panimbang.

Lampiran Surat Kepala BPJT

Nomor : BM.07.02 -P /237

Tanggal : 22 Mei 2019

1. LAMPIRAN 1.

**DAFTAR SIMAK LAPORAN BULANAN KONSULTAN PENGENDALI
MUTU INDEPENDEN**

2. LAMPIRAN 2.

**FORMAT LAPORAN BULANAN KONSULTAN PENGENDALI MUTU
INDEPENDEN**

Daftar SIMAK Laporan Bulanan Konsultan Pengendali Mutu Independen				
KLUSTER	(DIISI TRANS JAWA, TRANS SUMATERA, KALIMANTAN, SULAWESI, JABODETABEK, NON TRANS JAWA)			
Konsultan PMI	PT XXX			
Ruas Jalan Tol	Jalan Tol XXX			
Team Leader	Ir. A.A.A.A			
Laporan Bulan				
Diterima tanggal				
Tanggal penerimaan sesuai KAK	tanggal 20 bulan berikutnya			
Softcopy (email)				
Evaluasi Laporan	Konsultan PMI	BUJT	BPJT	KETERANGAN
Executive Summary	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Data Umum	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Data Teknis	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Peta Lokasi / Trase	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Stripmap	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Hubungan Kerja BPJT, BUJT, PMI				
Struktur Organisasi Kontraktor	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Struktur Organisasi Konsultan Supervisi	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Struktur Organisasi Konsultan PMI	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Progress				
Progress Fisik	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Progress Lahan	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Evaluasi KAK				
Pengendalian dan evaluasi manajemen dan monitoring progress konstruksi (1)	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Melakukan kunjungan lapangan secara berkala dan/atau insidental (2)	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap uji mutu material dan melakukan evaluasi terhadap laporan uji mutu material (3)	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Melakukan evaluasi atas ketersediaan dan kesesuaian kebutuhan SDM, material dan peralatan konstruksi (4)	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Melakukan evaluasi terhadap prosedur kerja, tahapan dan metode konstruksi (5)	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Melakukan evaluasi terhadap pemenuhan jadwal konstruksi sesuai dengan kurva S (6)	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Memantau dan memastikan BUJT dalam pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan(UKL/UPL) serta memberikan rekomendasi dan evaluasi K3 dan pelaksanaan manajemen lalu lintas di lapangan selama masa konstruksi (7)	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Memberikan laporan khusus kepada BPJT dan BBPJN terkait apabila terjadi kejadian penting yang mengganggu pelaksanaan konstruksi dalam waktu 24 jam setelah kejadian dan memberikan rekomendasi atas kejadian tersebut (8)	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Melakukan koordinasi dengan PPK pengadaan tanah dalam monitoring progress pembebasan tanah (9)	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Melakukan evaluasi di lapangan terhadap usulan pemerintah daerah/instansi terkait berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi (10)	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Membantu BPJT dalam pelaksanaan evaluasi usulan perubahan design dan perubahan lingkup konstruksi di lapangan yang diusulkan oleh BPJT (11)	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Membantu BPJT dalam pelaksanaan evaluasi laik fungsi dan operasi dan jalan tol (12)	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Menghadiri rapat terjadwal yang diselenggarakan BPJT/BBPJN/BUJT/Kontraktor/Konsultan Supervisi, atau mengundang rapat pihak pelaksana konstruksi secara terjadwal (13)	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Menyampaikan saran/masukan/rekomendasi/melalui surat tertulis kepada BUJT dengan tembusan kepada BPJT dan BBPJN, Ditjen Bina Marga (14)	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
Menyusun program atau rencana kerja mingguan untuk bulan berjalan dan bulan berikutnya serta evaluasi terhadap realisasi rencana kerja bulan sebelumnya (15)	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	<input type="checkbox"/> ADA <input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
	Konsultan PMI	BUJT	BPJT	
	(.....)	(.....)	(.....)	



LOGO DAN NAMA BUJT



PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN JALAN TOL ...

SEKSI ...

NAMA DAN LOGO KONSULTAN

SURAT PENGANTAR
KOP PENYEDIA JASA KONSULTAN PMI

Lokasi Proyek, Tgl/Bln/Thn

Nomor :
Lampiran : -

Kepada Yth :
Kepala Bidang Teknik Badan Pengatur Jalan Tol
Kementerian Pekerjaan Umum

Di : Jakarta

Perihal : Laporan Bulanan No.Xx Bulan Xx Tahun Xxxx

Dengan Hormat,

Sesuai dengan tugas kami Konsultan Pengendalian Mutu Independen (PMI) Pekerjaan Pembangunan **Jalan Tol xxx-xxx** yang tertuang dalam Kontrak **No. xxx**, tanggal xx bulan tahun, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan **No.xx Bulan xx Tahun xxxx** sebagai informasi terhadap perkembangan pekerjaan Pembangunan Jalan Tol xxx - xxx.

Demikian Laporan Bulanan ini disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami,

(.....)
Team Leader

Tembusan:

- Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)
- Kepala BBPJN/BPJN (.....)
- Direktur Utama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT (.....)

Executive Summary merupakan penjabaran singkat mengenai keseluruhan isi laporan yang akan memudahkan dalam mengidentifikasi Proyek Jalan Tol yang dimaksud]. **Executive summery** harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Peta Lokasi Proyek:

[Menjelaskan tentang lokasi proyek baik secara administratif maupun secara koordinat. Boleh menggunakan citra satellite atau google map untuk menunjukkan lokasi proyek jalan tol yang dimaksud. Diberikan penjelasan pembagian per seksi, beserta panjangnya.]



Gambar 1. Peta Lokasi Proyek (contoh)

2. Data Teknis

Tabel 1 Data Teknis Proyek Jalan Tol

DATA TEKNIS	NILAI/JUMLAH
Kecepatan rencana	
Lajur	
Lebar Lajur	
Lebar Bahu Jalan Luar	
Lebar Median	
Jenis Perkerasan	
Jumlah Gerbang Tol	
Jumlah On/Off Ramp	
Jumlah Simpang Susun	
Jumlah Under Bridge	

DATA TEKNIS	NILAI/JUMLAH
Jumlah Overpass	
Jumlah Underpass	
Jumlah JPO	
Jumlah Box Pedestrian	
<i>Jenis bangunan perlintasan lainnya yang belum disebutkan</i>	
Jumlah Rest Area/TIP	
Perkiraan lintas harian rencana (LHR)	XXX (tahun xxx)
Masa Konsesi	

3. Status Kemajuan Proyek

3.1. Progres Desain

Table 2 Progress Desain Proyek Jalan Tol

NO	DESIGN	STATUS
1	GEOMETRIK	Diisi status pembahasan desain Jika sudah disetujui ditulis disetujui Bina Marga tanggal XXX
2	DRAINAGE	
3	STRUKTUR	
4	GEOTEKNIK	
5	MARKA, PERAMBUAN DAN BANGUNA PELENGKAP JALAN TOL	

3.2. Progres Pengadaan Tanah

Tabel 3 Data Progres Pengadaan Tanah

Seksi	Kebutuhan Lahan			Lahan Bebas			Sisa Lahan			
	Luas (m ²)	Jml Bidang	Panjang (km)	Luas (m ²)	Jml Bidang	Panjang (km)	Bobot (%)	Luas (m ²)	Bidang	Panjang (km)
Seksi 1										
Seksi 2										
TOTAL										

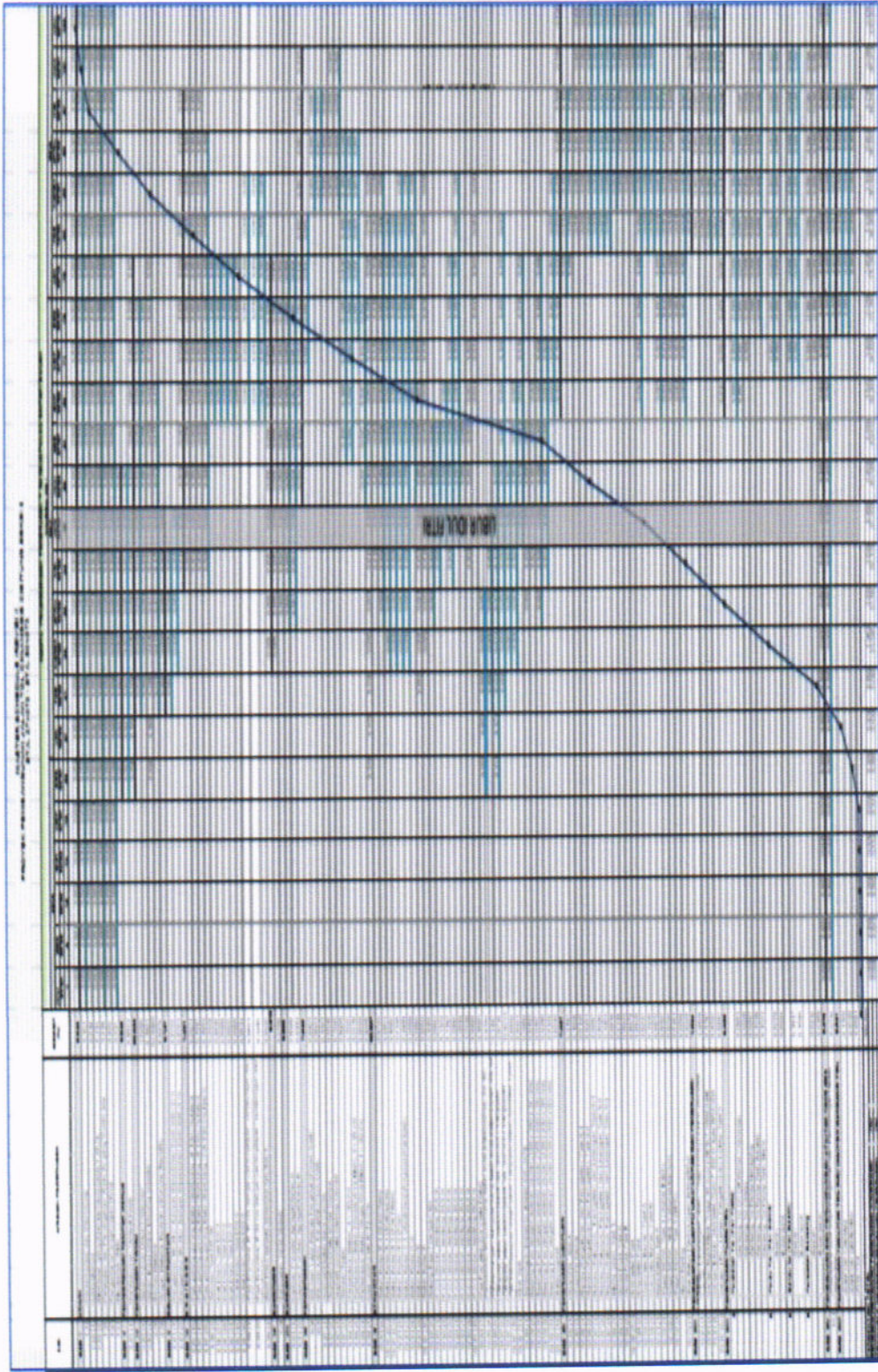
Analisa singkat tentang progress pembebasan tanah

3.3. Progres Fisik

Tabel 4 Data Progres Konstruksi Proyek Jalan Tol

Seksi	Panjang (km)	Progress Fisik (%)			Monitoring Waktu			Target Operasi		Progress Total (%)
		Rencana	Realisasi	Deviasi	Total (hari) (%)	Terpakai (hari) (%)	Sisa (hari) (%)	Rencana	Realisasi	
Seksi 1										
Seksi 2										
TOTAL										

Analisa singkat tentang progres konstruksi



Gambar 2 Kurva S (dapat ditampilkan kurva S per seksi atau kurva S total project)

Tabel 5 Data Progres Bangunan Terbangun

No	Bangunan Perlintasan	Jumlah Rencana	Jumlah Terbangun	Keterangan
1	Overpass	5	3	CONTOH
2	lainnya			

4. Temuan Hasil Pemeriksaan

Sebagai bentuk monitoring tindak lanjut atas temuan bulan sebelumnya dan bulan berjalan

Tabel 6 Monitoring Temuan Hasil Pemeriksaan

No	Foto Dan Tanggal	Jenis Temuan	Jenis Rekomendasi	Status	
				Open	Closed

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
SURAT PENGANTAR.....	1
EXECUTIVE SUMMARY	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	10
DAFTAR GAMBAR.....	11
BAB 1 PENDAHULUAN	12
1.1. Latar Belakang	12
1.2. Hubungan kerja antara BPJT-BUJT-PMI-BINA MARGA.....	12
1.2.1. Badan Pengatur Jalan Tol	13
1.2.2. Badan Usaha Jalan Tol.....	13
1.2.3. Pengendali Mutu Independen (PMI).....	15
1.2.3.1. Data Kontrak Konsultan PMI	15
1.2.3.2. Tugas dan Fungsi Konsultan PMI.....	15
1.2.3.3. Tugas dan Fungsi Konsultan PMI.....	19
1.2.4. Direktorat Jenderal Bina Marga	20
BAB 2 INFORMASI PROYEK.....	21
2.1. Data Proyek	21
2.2. Informasi Pemilik Proyek	22
2.3. Struktur Organisasi Proyek.....	22
2.3.1. Struktur Organisasi Kontraktor.....	22
2.3.2. Struktur Organisasi Konsultan Pengawas	23
2.4. Jumlah Tenaga Kerja (SDM).....	24
BAB 3 PROGRES DAN KEMAJUAN PEKERJAAN	26
3.1. Progress Pekerjaan Desain	26
3.2. Progres Pengadaan Lahan	26
3.3. Progress Konstruksi.....	28
3.3.1. Analisis Capaian Pekerjaan.....	28

3.3.2.	Strip Map Pelaksanaan Konstruksi.....	30
BAB 4	KEGIATAN PENGENDALI MUTU INDEPENDEN (PMI)	33
4.1.	Evaluasi Pemenuhan Sistem Manajemen Mutu.....	33
4.2.	Evaluasi Desain dan Perubahan Lingkup Konstruksi	33
4.3.	Evaluasi Ketersediaan SDM, material dan peralatan	34
4.4.	Pengawasan Uji Mutu Material.....	34
4.5.	Evaluasi Prosedur Kerja	34
4.6.	Evaluasi Pelaksanaan RKL, RPL, & SMK3	35
4.7.	Laporan Hasil Koordinasi dengan Instansi Terkait.....	37
4.8.	Laporan Kunjungan Lapangan	37
4.9.	Laporan Rapat Koordinasi	37
4.10.	Laporan Hasil Pendampingan Laik Fungsi Jalan dan Operasional Jalan	38
4.11.	Laporan Khusus Kepada BPJT	39
4.12.	Realisasi dan Rencana Kerja PMI	39
4.12.1.	Realisasi Kegiatan PMI (Periode bulan berjalan).....	39
4.12.2.	Rencana Kerja PMI (Periode bulan berikutnya).....	39
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	41
5.1.	Kesimpulan.....	41
5.2.	Saran	41
LAMPIRAN - LAMPIRAN		42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informasi Umum Tentang Data Kontrak PMI.....	15
Tabel 1.2 Daftar Personil PMI.....	20
Tabel 2.1 Data Teknis Proyek Jalan Tol xxx.....	21
Tabel 2.2 Data Kontrak Kontraktor.....	23
Tabel 2.3 Data Kontrak Konsultan Pengawas.....	24
Tabel 2.4 Daftar Jumlah Tenaga Kerja.....	24
Tabel 3.1 Laporan Progress Pengadaan Lahan.....	26
Tabel 3.2 Laporan Progress Konstruksi.....	28
Tabel 3.3 Rincian Progress Pembangunan Bangunan Perlintasan..	30
Tabel 4.1 Kelengkapan Dokumen Proyek.....	33
Tabel 4.2 Pemetaan Jumlah Tenaga Kerja.....	34
Tabel 4.3 Pemetaan Jumlah Tenaga Kerja.....	34
Tabel 4.4 Identifikasi Permasalahan pada Proyek Jalan Tol.....	35
Tabel 4.5 Evaluasi Pelaksanaan RKL, RPL, & SMK3.....	36
Tabel 4.6 Laporan Kunjungan Lapangan.....	37
Tabel 4.7 Realisasi Kegiatan PMI.....	39
Tabel 4.8 Rencana Kegiatan PMI.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Jalan Tol	12
Gambar 2. Struktur Organisasi BPJT	14
Gambar 3. Struktur Organisasi PMI.....	19
Gambar 4. Struktur Organisasi PMI.....	22
Gambar 5. Struktur Organisasi Kontraktor.....	22
Gambar 6. Struktur Organisasi Konsultan Pengawas	23
Gambar 7. Contoh Peta Status Lahan.....	27
Gambar 8. Contoh Hasil Review Kurva S	29
Gambar 9. Contoh Strip Map Pekerjaan Jalan Tol	31
Gambar 10. Contoh Notulen Rapat.....	38

BAB 1

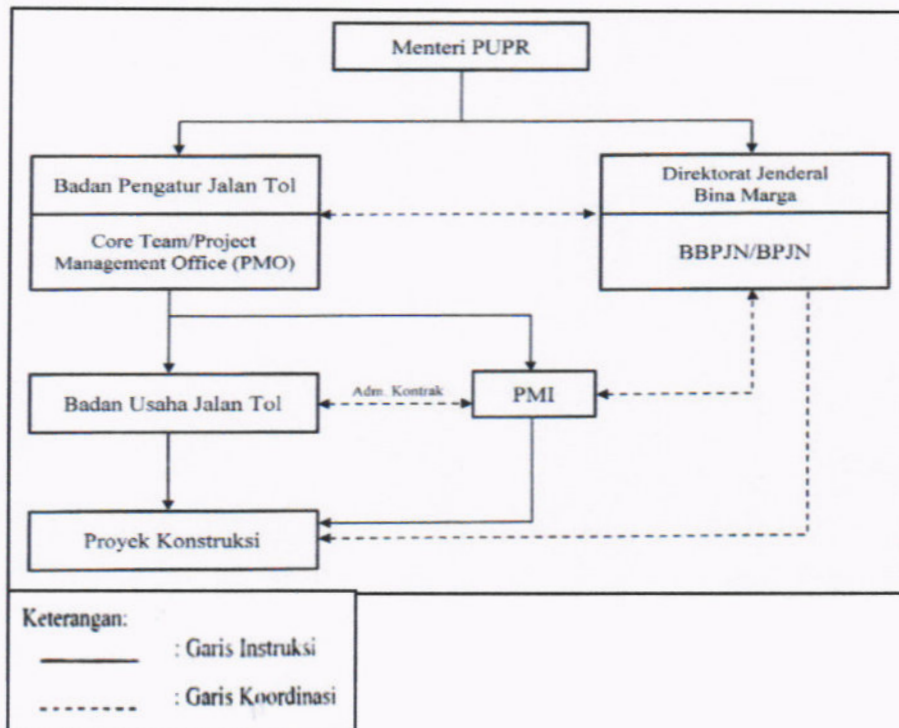
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Agar disampaikan tentang gambaran umum Proyek Pekerjaan Jalan tol yang dimaksud. Mulai dari lokasi pekerjaan Jalan tol, total panjang, pembagian sekmen juga gambaran singkat tentang mengapa jalan Tol tersebut harus dibangun, urgensinya apa, manfaatnya apa.

1.2. Hubungan kerja antara BPJT-BUJT-PMI-BINA MARGA

Uraian singkat mengenai pengorganisian antara BPJT dan BUJT, agar dibuatkan bagan seperti contoh berikut sesuai dengan KAK PMI.



Gambar 1. Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Jalan Tol

(sumber: SE Menteri PUPR No. 8/SE/M/2017 tentang Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Jalan Tol yang Dilaksanakan Oleh Badan Usaha Jalan Tol)

1.2.1. Badan Pengatur Jalan Tol

Tugas dan fungsi BPJT sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR nomor 08/SE/M/2017 tentang Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Jalan Tol yang Dilaksanakan Oleh Badan Usaha Jalan Tol, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga dan/atau BBPJT/BPJT terkait pelaksanaan konstruksi jalan tol.
2. Melakukan pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai PPJT.
3. Menugaskan *Core Team/PMO* untuk membantu BPJT dalam pelaksanaan monitoring dan pengawasan terkait pekerjaan konstruksi sesuai dengan PPJT.
4. Menugaskan Konsultan PMI untuk melakukan pengendalian mutu konstruksi termasuk pemenuhan lingkup PPJT dan waktu pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh BUJT.
5. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga terkait target penyelesaian, kemajuan pekerjaan, dan penanganan permasalahan yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan konstruksi termasuk melaksanakan arahan Menteri PUPR.
6. Melakukan analisis lapangan terkait pemenuhan lingkup pekerjaan, kemajuan pekerjaan, pemenuhan mutu pekerjaan, dan permasalahan yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan konstruksi.
7. Memberikan laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serta rekomendasi atau usulan kepada Menteri PUPR terkait penanganan permasalahan yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan konstruksi.

1.2.2. Badan Usaha Jalan Tol

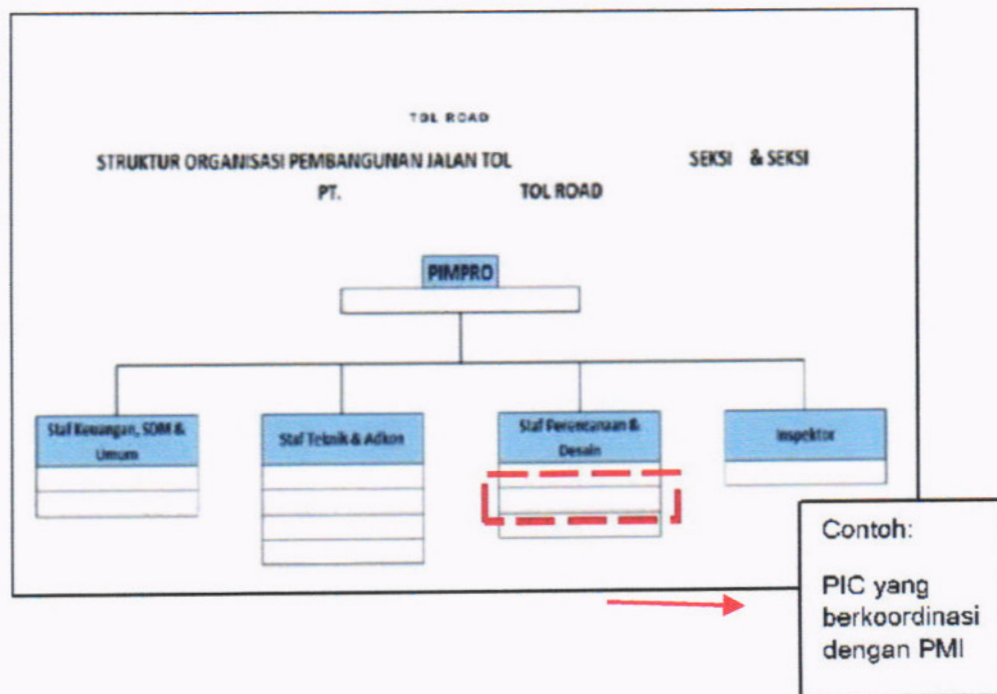
Tugas dan fungsi BUJT sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR nomor 08/SE/M/2017 tentang Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Jalan Tol yang Dilaksanakan Oleh Badan Usaha Jalan Tol, antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan PPJT.
2. Menjamin dan bertanggung jawab penuh atas proses pelaksanaan, proses pengawasan mutu, dan pelaksanaan konstruksi untuk tercapainya mutu pelaksanaan dan mutu konstruksi yang aman, dan nyaman sesuai peraturan dan persyaratan teknis yang berlaku.

3. Menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya diimplementasikannya Rencana Teknik Akhir (RTA) di lapangan sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan persyaratan yang berlaku.
4. Membuat dan melaksanakan sistem internal manajemen untuk pengendalian, pelaksanaan, dan pengendalian mutu konstruksi.
5. Melaksanakan rekomendasi dan masukan dari BPJT baik melalui Konsultan PMI, maupun Core Team/PMO BPJT serta Direktorat Jenderal Bina Marga, untuk ditindaklanjuti.
6. Melakukan koordinasi di lapangan dengan seluruh unit pelaksana pengawasan untuk tercapainya mutu pekerjaan.
7. Memberi akses sepenuhnya kepada Direktorat Jenderal Bina Marga, BBPJM/BPJM, Konsultan PMI, Core Team/PMO BPJT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pada bab ini juga harus dicantumkan struktur organisasi BUJT, dengan tujuan untuk mengetahui pairing personil/ divisi yang berkordinasi secara intensif dengan Konsultan PMI.

Contoh :



Gambar 2. Struktur Organisasi BPJT

1.2.3. Pengendali Mutu Independen (PMI)

1.2.3.1. Data Kontrak Konsultan PMI

Menjelaskan data kontrak PMI sebagai berikut:

Tabel 1.1 Informasi Umum Tentang Data Kontrak PMI

DATA KONTRAK	KETERANGAN
Nama Konsultan	
No.Kontrak	<i>Jika terdapat addendum agar juga dicantumkan</i>
Tanggal Kontrak	
SPMK	
Nilai Kontrak	
Masa Pelaksanaan	

1.2.3.2. Tugas dan Fungsi Konsultan PMI

Tugas dan fungsi Pengendali Mutu Independen (PMI) sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR nomor 08/SE/M/2017 tentang Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Jalan Tol yang Dilaksanakan Oleh Badan Usaha Jalan Tol, antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung BPJT dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA) dan pemenuhan spesifikasi teknis dalam pelaksanaan konstruksi jalan tol, termasuk review Rencana Mutu Kontrak (RMK) Konstruksi dari kontraktor dan Rencana Mutu Pengawasan (RMP) dari Konsultan Supervisi, serta memberikan rekomendasi kepada BUJT secara langsung dan/atau melalui BPJT.
2. Melaksanakan analisis dengan cara turun langsung ke lapangan secara periodik dan berkoordinasi dengan BUJT dan Konsultan Supervisi untuk memastikan pemenuhan lingkup, kemajuan pekerjaan, mutu, dan waktu pekerjaan.
3. Berkoordinasi dengan BBPJN/BPJJN terkait permasalahan dalam pemenuhan mutu pekerjaan, dan permasalahan yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan konstruksi

4. Memberikan laporan bulanan dan/atau laporan khusus terkait kemajuan, mutu dan waktu pekerjaan konstruksi kepada jalan tol kepada BPJT termasuk Core Team/PMO BPJT dan BBPJN/BPJN, termasuk rekomendasi penanganan permasalahan yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan konstruksi.

Selain itu sesuai Kerangka Acuan Kerja Konsultan PMI Konstruksi Jalan Tol, tugas umum Konsultan PMI antara lain:

1. Perencanaan
 - a. Memastikan kesiapan dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA) dan spesifikasi teknis untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan konstruksi dan melakukan evaluasi terhadap usulan review desain.
 - b. Melakukan review dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap Rencana Mutu Kontrak (RMK) Konstruksi dari kontraktor dan Rencana Mutu Pengawasan (RMP) dari Konsultan Supervisi
2. Proses
 - a. Melakukan pengawasan pelaksanaan RMK oleh kontraktor dan pelaksanaan RMP oleh Konsultan Supervisi, serta memberikan rekomendasi kepada BUJT melalui BPJT.
 - b. Melakukan evaluasi atas potensi keterlambatan penyelesaian konstruksi akibat lahan yang belum bebas, kendala utilitas, penyesuaian desain, atau yang belum dapat dilakukan konstruksinya.
 - c. Mengevaluasi kesesuaian produk konstruksi jalan tol yang dibangun oleh BUJT dengan RTA dan standar mutu yang telah ditetapkan. Kesesuaian produk konstruksi jalan tol ditunjukkan dengan pemenuhan aspek-aspek: fungsi, keandalan, keawetan dan kemudahan pemeliharaan

Lingkup tugas dan tanggung jawab Konsultan PMI dalam tahap konstruksi antara lain:

1. Melakukan pengendalian dan evaluasi sistem manajemen mutu, monitoring dan review progres pelaksanaan konstruksi, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi, tanggapan dan rekomendasi

kepada BPJT dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Ditjen Bina Marga.

2. Melakukan kunjungan lapangan secara rutin untuk evaluasi kesesuaian pelaksanaan konstruksi terhadap RTA dan spesifikasi teknik yang mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga nomor 02/SE/Db/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Penyampaian Spesifikasi Teknis dan Spesifikasi Khusus Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga serta kesesuaian pelaksanaan supervisi terhadap RMP yang telah disetujui di tahap persiapan.
3. Melakukan dokumentasi video drone sebagai salah satu hasil pengawasan progres konstruksi yang disampaikan ke BPJT tiap bulan bersamaan dengan pengumpulan Laporan Bulanan.
4. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan uji mutu material dan produk yang dilakukan BUJT serta melakukan evaluasi terhadap laporan pengujian mutu yang disampaikan oleh BUJT. Apabila Konsultan PMI memandang terdapat ketidaksesuaian antara mutu pelaksanaan pekerjaan kontraktor dengan spesifikasi teknik maka Konsultan PMI berhak meminta BUJT untuk melakukan uji sampel mutu produk secara terpisah, serta mengevaluasi kesesuaian hasil uji sampel mutu produk yang dilaksanakan dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Seluruh biaya untuk pelaksanaan uji sampel mutu produk menjadi tanggung jawab BUJT. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, Konsultan PMI memberikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan, pembongkaran bahkan sampai pada penghentian kegiatan konstruksi. Tindakan perbaikan yang dilakukan oleh BUJT tersebut harus dikendalikan Konsultan PMI.
5. Melakukan evaluasi atas ketersediaan dan kesesuaian kebutuhan sumber daya manusia, material, dan peralatan konstruksi di lapangan, dalam rangka penyelesaian rencana kerja yang telah disepakati.
6. Melakukan evaluasi terhadap prosedur kerja, tahapan dan metode konstruksi.
7. Melakukan evaluasi terhadap pemenuhan jadwal konstruksi sesuai Kurva S termasuk memberikan pendapat mengenai penyebab keterlambatan dan solusi untuk mengejar keterlambatan sesuai dengan ketentuan dalam PPJT.

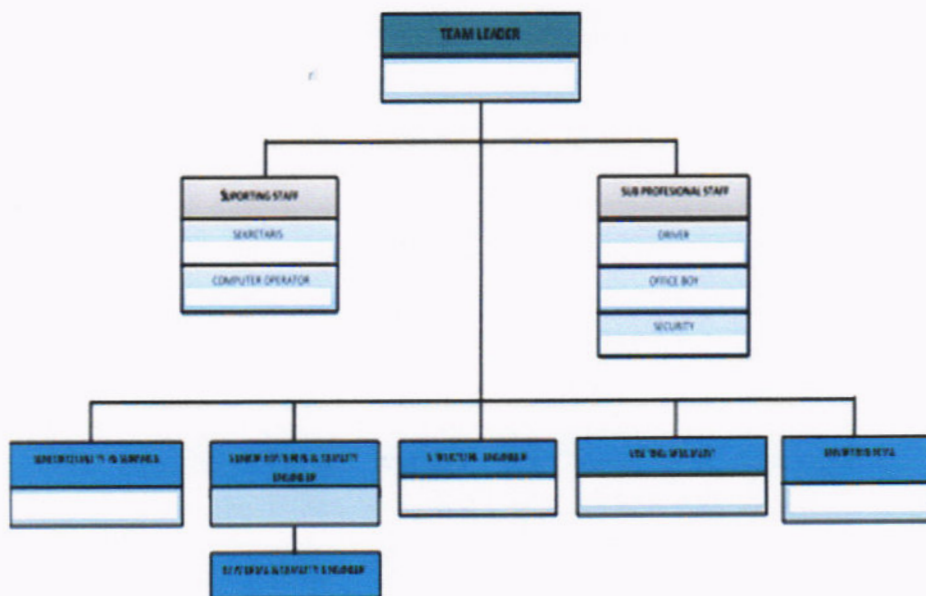
8. Memantau dan memastikan kewajiban BUJT dalam pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL/UPL), memberikan saran/rekomendasi terkait pengelolaan dampak lingkungan, dan evaluasi atas pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta pelaksanaan manajemen lalu lintas di lapangan selama masa konstruksi. Selama tahap konstruksi, apabila berdasarkan pengamatan dan penilaian Konsultan PMI, BUJT tidak menerapkan manajemen lingkungan, manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta manajemen lalu lintas sesuai dengan persyaratan, maka Konsultan PMI harus segera melaporkan kepada BPJT dan apabila diperlukan dapat merekomendasikan penundaan sebagian atau seluruh pekerjaan.
9. Memberikan laporan khusus kepada BPJT dan BBPJN, Ditjen Bina Marga apabila terjadi kejadian penting yang mengganggu pelaksanaan konstruksi dalam waktu 24 jam setelah kejadian, serta memberikan rekomendasi atas kejadian tersebut.
10. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah dalam monitoring progres pembebasan tanah termasuk permasalahan dan tindak lanjut penyelesaiannya di lapangan.
11. Melakukan evaluasi di lapangan terhadap usulan Pemerintah Daerah/ instansi terkait berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi di lapangan.
12. Membantu BPJT dalam pelaksanaan evaluasi usulan perubahan desain dan perubahan lingkup konstruksi di lapangan yang diusulkan oleh BUJT.
13. Membantu BPJT dalam upaya peningkatan efektivitas *dashboard* sistem informasi dalam penyusunan porto folio proyek jalan tol di Indonesia.
14. Membantu BPJT dalam pelaksanaan evaluasi laik fungsi dan operasi jalan tol. Konsultan PMI melakukan evaluasi persiapan laik fungsi terkait evaluasi dokumen, evaluasi hasil konstruksi di lapangan, dan evaluasi fasilitas pelayanan keselamatan, di samping pemeriksaan kesesuaian produk konstruksi jalan tol yang memenuhi aspek-aspek: fungsi, keandalan, keawetan dan kemudahan pemeliharaan.
15. Menghadiri rapat terjadwal yang diselenggarakan oleh BPJT/BBPJN/BUJT/ Kontraktor/Konsultan Supervisi, atau mengundang rapat pihak pelaksana konstruksi secara terjadwal,

serta menyampaikan saran/masukan/ rekomendasi yang dituangkan dalam notulensi rapat pembahasan.

16. Menyampaikan saran/masukan/rekomendasi melalui surat tertulis kepada BUJT dengan tembusan kepada BPJT dan BBPJN, Ditjen Bina Marga.
17. Menyusun program atau rencana kerja mingguan untuk bulan berjalan dan bulan berikutnya serta evaluasi terhadap realisasi rencana kerja bulan sebelumnya. Program kerja tersebut mencakup antara lain: pemeriksaan lapangan, monitoring pengujian material, evaluasi sumber daya, monitoring Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3), rapat pembahasan dan koordinasi dengan instansi terkait.

1.2.3.3. Struktur Organisasi Konsultan PMI

Pada Bab ini mencantumkan struktur organisasi seperti berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi PMI

[Memuat bagan tentang struktur organisasi Konsultan PMI, mulai dari Team Leader dan semua staff dan tenaga konstruksi yang ikut dalam tim PMI.

PMI harus menjabarkan semua nama-nama tim beserta jabatannya masing-masing. Pada bagian ini juga harus dijabarkan dengan jelas tugas dan tanggungjawab masing-masing individu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Daftar Personil PMI

No.	Tenaga Ahli *)	Nama	Tugas
A. Tenaga Ahli Senior			
1.	Team Leader / Ahli Jalan Raya Senior		
2.	Ahli <i>Quality Assurance</i> dan <i>Quality Control</i> Senior		
3.	Ahli Manajemen Proyek Senior		
B. Tenaga Ahli			
1.	Ahli Jalan Raya		
2.	Ahli Struktur		
3.	Ahli Material dan Mutu (<i>Quality</i>)		
4.	Ahli Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan		
C. Visiting Specialist			
1.	Tenaga Ahli Spesialis **)		
D. Asisten Tenaga Ahli***)			

1.2.4. Direktorat Jenderal Bina Marga

Tugas dan fungsi Ditjen Bina Marga sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR nomor 08/SE/M/2017 tentang Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Jalan Tol yang Dilaksanakan Oleh Badan Usaha Jalan Tol, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan arahan kepada BBPJN/BPJN terkait pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan tol.
2. Berkoordinasi dengan BPJT terkait target penyelesaian, kemajuan pekerjaan, dan penanganan permasalahan yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan konstruksi termasuk melaksanakan arahan Kementerian PUPR.
3. Melakukan pengamatan lapangan baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan BPJT, terkait kemajuan pekerjaan dan permasalahan yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan konstruksi.
4. Memberikan rekomendasi atau masukan kepada Menteri PUPR terkait penanganan permasalahan yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan konstruksi.

BAB 2 INFORMASI PROYEK

2.1. Data Proyek

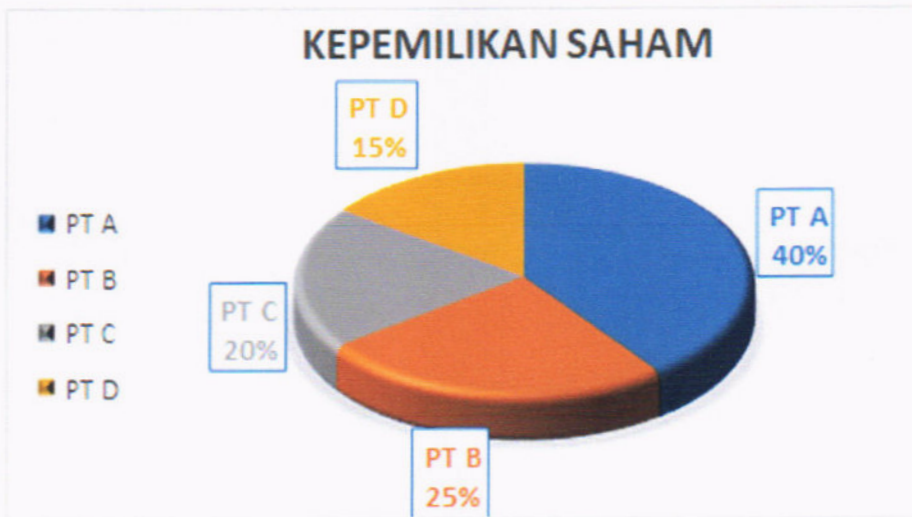
Memuat informasi proyek pekerjaan tol yang dimaksud secara umum berupa peta lokasi dan data teknis proyek jalan tol. Contoh:

Tabel 2.1 Data Teknis Proyek Jalan Tol xxx

DATA TEKNIS	NILAI/JUMLAH
Kecepatan rencana	
Lajur	
Lebar Lajur	
Lebar Bahu Jalan Luar	
Lebar Median	
Jenis Perkerasan	
Jumlah Gerbang Tol	
Jumlah On/Off Ramp	
Jumlah Simpang Susun	
Jumlah Under Bridge (Jembatan sungai)	
Jumlah Overpass	
Jumlah Underpass	
Jumlah JPO	
Jumlah Box Pedestrian	
<i>Jumlah Jenis Bangunan Perlintasan lainnya</i>	
Jumlah Rest Area/TIP	
Perkiraan lintas harian rencana (LHR)	XXX (tahun xxx)
Masa Konsesi	

2.2. Informasi Pemilik Proyek

Berupa info grafis bagaimana kepemilikan saham pada Jalan Tol yang dimaksud. Contoh:

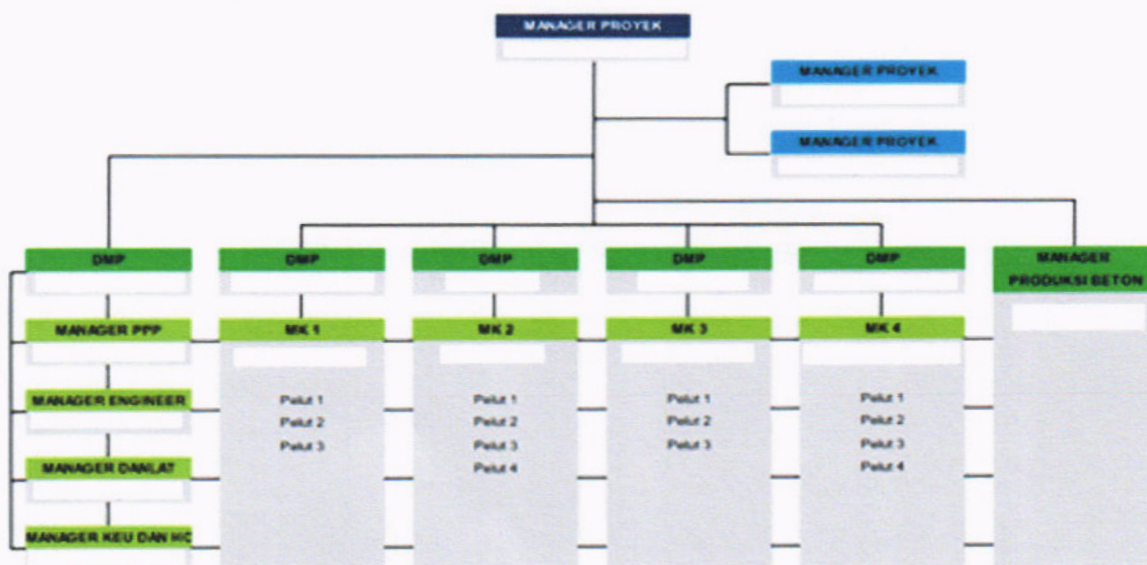


Gambar 4. Struktur Organisasi PMI

2.3. Struktur Organisasi Proyek

2.3.1. Struktur Organisasi Kontraktor

PMI harus menyertakan data-data tentang **kontraktor pelaksana per paket jika lebih dari 1 paket**, yang ditunjuk oleh BUJT untuk mengerjakan proyek yang dimaksud. Data tersebut berupa data kontrak dan struktur organisasi beserta nama-nama setiap personilnya.



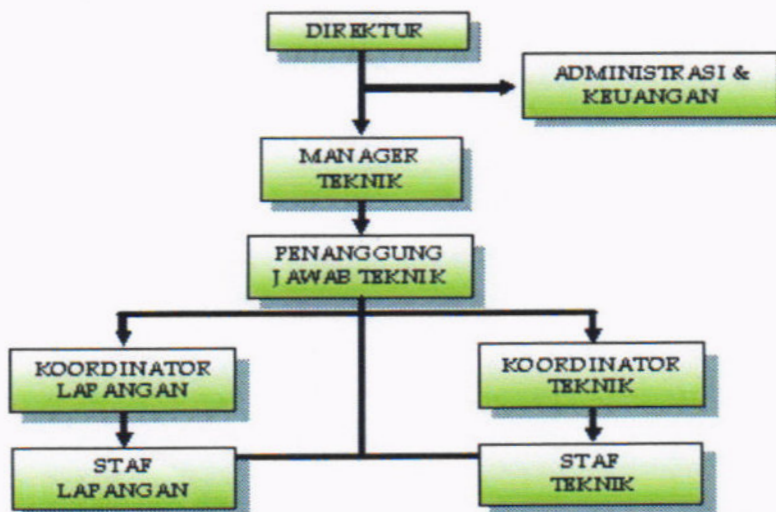
Gambar 5. Struktur Organisasi Kontraktor

Tabel 2.2 Data Kontrak Kontraktor

DATA KONTRAK	KETERANGAN
Kontraktor Pelaksana	
No.Kontrak	<i>Sebutkan jika ada adendum</i>
Tanggal Kontrak	
Nilai Kontrak	
Jenis kontrak	
Cara Pembayaran	
Masa Pelaksanaan	
Masa Pemeliharaan	
Lokasi Pekerjaan	

2.3.2. Struktur Organisasi Konsultan Pengawas

PMI harus menyertakan tugas dan fungsi sesuai kontrak data-data tentang konsultan pengawas yang ditunjuk oleh BUJT untuk mengawasi proyek yang dimaksud. Data tersebut berupa struktur organisasi beserta nama-nama setiap personilnya. Contoh;



Gambar 6. Struktur Organisasi Konsultan Pengawas

Tabel 2.3 Data Kontrak Konsultan Pengawas

DATA KONTRAK	KETERANGAN
Konsultan	
No.Kontrak	<i>Sebutkan jika ada kontrak adendumnya</i>
Tanggal Kontrak	
SPMK	
Nilai Kontrak	
Masa Pelaksanaan	

2.4. Jumlah Tenaga Kerja (SDM)

Tabel 2.4 Daftar Jumlah Tenaga Kerja

	Unit Pelaksana	Direksi	Tenaga Ahli	Kepala Divisi	Manager	Staff	Pekerja *)	Lainnya **)
1	BUJT							
2	Perencana							
3	Pengawas							
4	Kontraktor							
5	PMI							

keterangan: *) Tukang dan mandor

**) OB dan satpam

STATUS LAHAN (SAAT INI BELUM DAPAT DIKONSTRUKSIKAN)
SUB ZONA :

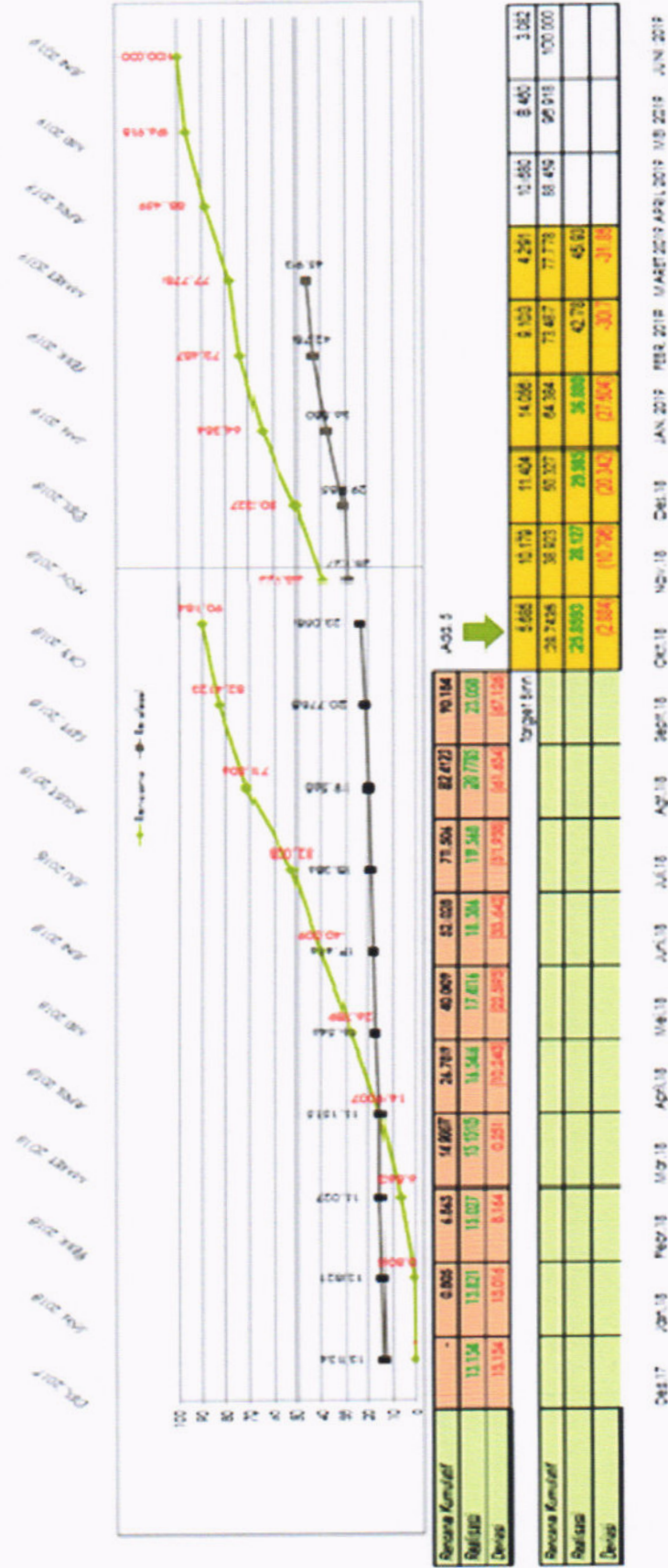


No	Lokasi Pekerjaan	Masalah
1.	Main Road (timbunan) Sta. <input type="text"/>	
2.	Konstruksi Ramp <input type="text"/>	

Gambar 7. Contoh Peta Status Lahan

Rencana dan Realisasi (S-Curve) Addendum V

Paket - : Sfo.
 Proyek Pembangunan



Gambar 8. Contoh Hasil Review Kurva S

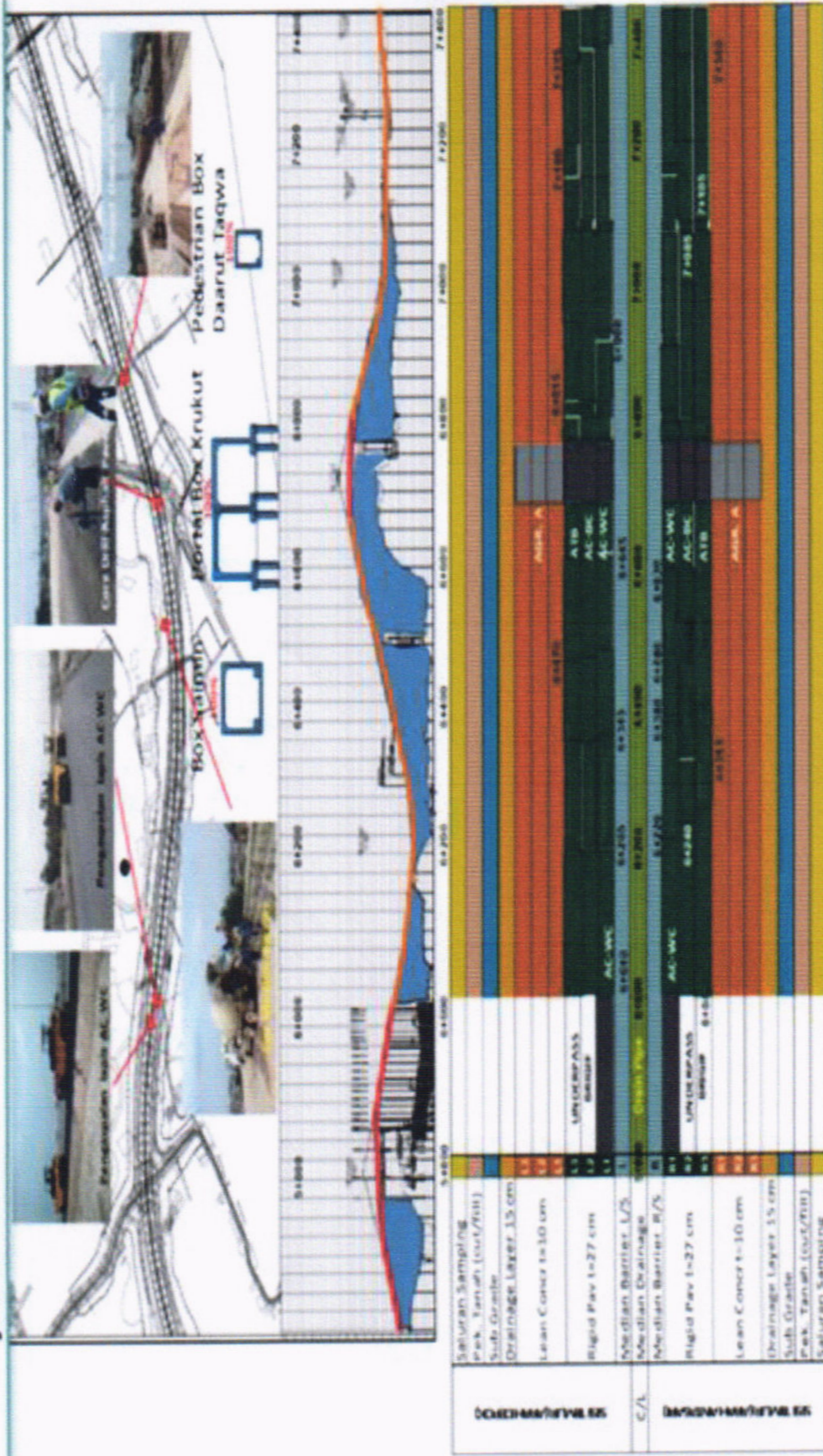
3.3.2. Strip Map Pelaksanaan Konstruksi

Konsultan PMI harus menyertakan Mapping berupa titik-titik pekerjaan dan pekerjaan apa yang sedang dikerjakan pada titik tersebut. Untuk memperjelas harus disertakan dokumentasi-dokumentasi yang dilakukan konsultan PMI dan dibuat dalam table beserta keterangan dengan jelas. Contoh:

Tabel 3. 3 Rincian Progress Pembangunan Bangunan Perlintasan

No	Jenis Bangunan Perlintasan	Lokasi	Status Terbangun	Keterangan
1	Overpass	Sta XX	Terbangun	
		Sta YY	Proses konstruksi	XX %
		Sta ZZ	Belum terbangun	Terkendala lahan
2	Undeprass			
3	dst			

STRIP MAP PERKERASAN JALANTOL STA.



Gambar 9. Contoh Strip Map Pekerjaan Jalan To

BAB 4

KEGIATAN PENGENDALI MUTU INDEPENDEN (PMI)

4.1. Evaluasi Pemenuhan Sistem Manajemen Mutu

Salah satu tugas konsultan PMI adalah memastikan setiap dokumen-dokumen yang diperlukan sudah disiapkan dengan lengkap oleh setiap stakeholder-stakeholder yang ada dalam proyek tersebut. Untuk memudahkan dalam mengecek Konsultan PMI boleh menguraikan dalam table Check List seperti contoh dibawah ini. Contoh:

Tabel 4. 1 Kelengkapan Dokumen Proyek

	Ketersediaan Dokumen Proyek	Status (ada/tidak)	Keterangan
1	RMP dan RMK		
2	Data Material dan Rantai Pasok		
3	Dokumen Kontrak		
4	Dokumen Shop Drawing		
5	Lap. Pelaksanaan SMK3, RKL & RPL		

Konsultan PMI harus memberikan masukan dan saran kepada Kontraktor dalam penerapan SMM tersebut dan dilaporkan dalam Laporan PMI masukan, saran dan tindak lanjutnya.

4.2. Evaluasi Desain dan Perubahan Lingkup Konstruksi

Dalam Pelaksanaan Konstruksi sebuah pekerjaan kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan terhadap RTA. Tugas PMI adalah melaporkan perubahan-perubahan terhadap RTA yang ada selama konstruksi dan menyampaikan Analisa terhadap perubahan tersebut. Uraian tentang perubahan-perubahan tersebut harus disertakan dalam laporan PMI.

4.3. Evaluasi Ketersediaan SDM, material dan peralatan

Konsultan PMI wajib melaporkan rencana dan realisasi pemenuhan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), material dan peralatan dari kontraktor. Contoh:

Tabel 4. 2 Pemetaan Jumlah Tenaga Kerja

No	Posisi	Jumlah Tenaga Kerja		Keterangan
		Rencana	Realisasi	
1. Konsultan Pengawas				
	Resident Engineer			
	Dst			
2. Kontraktor Pelaksana				
	Kepala Proyek (general Superintendent)			
	dst			

Tabel 4. 3 Pemetaan Jumlah Tenaga Kerja

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Alat	Jumlah alat		Kapasitas Alat		Keterangan
			Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
	Pekerjaan Tanah						

4.4. Pengawasan Uji Mutu Material

Sub Bab ini memuat seluruh data pengujian Material yang dilakukan oleh Kontraktor dengan Pengawasan Konsultan. Mutu material harus sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam dokumen kontrak. Pengujian itu antara lain uji tekan beton, spesifikasi tulangan yang digunakan, dan Material-material lainnya. Konsultan PMI harus ikut mengawasi Kegiatan tersebut dan harus melaporkannya dalam Laporan PMI.

4.5. Evaluasi Prosedur Kerja

Konsultan PMI harus memaparkan dan mengecek juga tentang metode pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan yang dibuat oleh Kontraktor yang kemudian akan disetujui oleh konsultan pengawas sebelum kontraktor mulai mengerjakan item pekerjaan yang dimaksud. Metode pelaksanaan dapat dilampirkan dalam Laporan PMI.

Konsultan PMI harus memastikan berjalannya *Standar Operating Procedure* (SOP) pelaksanaan dengan baik di lapangan. Jika kemudian pad pelaksanaannya pihak penyedia jasa (Kontraktor tidak melaksanakan SOP dengan baik maka Konsultan PMI harus mencantulkannya dalam laporan PMI. Formatnya dapat berupa poin-poin kejadian yang dimaksud beserta peran Konsultan PMI didalamnya.

Dalam pelaksanaan konstruksi dimungkinkan terjadi permasalahan-permasalahan. Tugas PMI adalah melaporkan permasalahan-permasalahan yang ada selama konstruksi dan rencana tindak lanjutnya seperti apa. Uraian tentang permasalahan dan rencana tindak lanjut tersebut harus disertakan dalam laporan PMI. Contoh:

Tabel 4. 4 Identifikasi Permasalahan pada Proyek Jalan Tol

NO	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Permasalahan	Tindak Lanjut	Foto Dokumentasi
1.		Sta ...+..			
2.					
dst..					

4.6. Evaluasi Pelaksanaan RKL, RPL, & SMK3

Menguraikan seperti apa pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) di lapangan, dapat berupa check list ataupun laporan narasi disertai dengan dokumentasi foto. Konsultan PMI harus mengawasi dan melaporkan pelaksanaan RPL dan RKL di lapangan. Contoh:

4.7. Laporan Hasil Koordinasi dengan Instansi Terkait

Melaporkan rekomendasi dari Bina Marga dan Pemerintah daerah (jika ada) terkait pekerjaan jalan tol, dan laporan PPK Pengadaan Tanah tentang progress dan permasalahan pengadaan tanah.

4.8. Laporan Kunjungan Lapangan

Salah satu tugas dari Konsultan PMI adalah melakukan kunjungan lapangan secara rutin untuk evaluasi kesesuaian pelaksanaan konstruksi terhadap RTA dan spesifikasi teknik yang mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga nomor 02/SE/Db/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Penyampaian Spesifikasi Teknis dan Spesifikasi Khusus Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga serta kesesuaian pelaksanaan supervisi terhadap Rencana Mutu Proyek (RMP) yang telah disetujui di tahap persiapan. Secara rutin PMI harus melakukan kunjungan untuk pengamatan di lapangan dan memastikan kondisi aktual laporan yang disampaikan dalam rapat, kemudian membuatnya dalam sebuah table laporan kunjungan lapangan. Contoh sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Laporan Kunjungan Lapangan

No	Tanggal	Lokasi	Foto dokumentasi	Keterangan
1	mm-dd-yy			

4.9. Laporan Rapat Koordinasi

Tugas PMI salah satunya adalah koordinasi dan menghadiri rapat-rapat bulanan. Dalam Penyusunan Laporan PMI harus dicantumkan rapat-rapat apa saja yg diikuti oleh Konsultan PMI. Notulen rapat harus dilampirkan dalam format yang jelas mencakup waktu pelaksanaan, tempat, peserta rapat, dan permasalahan yang dibahas beserta lampiran foto. Contoh:

Suasana rapat minggu ke-85



RAPAT MINGGUAN
Tanggal 30 JUNI 2018
Periode Minggu Ke. 85 (20 JUNI-27 JUNI 2018)

Pemilik Proyek
Kontaktor
Konsultan

Hari/Tanggal
Tempat
Waktu

NOTULEN RAPAT

Progress dan Periode Konstruksi

PROGRES/SEKSI		SEKSI-2	SEKSI-3	SEKSI-4	Periode Konstruksi : 790 Hari
Progres Perseksi s/d Mg lalu ke 84 (Tgl 20 Mei 2018)	Rencana	53,68	73,91	44,05	Waktu Terpakai : 593 Hari
	Realisasi	55,07	73,56	47,07	
	Deviasi	1,39	-0,35	3,63	
Progres Perseksi Mg ini ke 85 (20 Juni-26 Juni 2018)	Rencana	1,93	2,26	1,56	Sisa Waktu Konstruksi : 197 Hari
	Realisasi	3,27	0,07	3,80	
	Deviasi	1,34	-2,19	2,24	
Progres Perseksi s/d Mg ini ke 85 (Tgl 26 Juni 2018)	Rencana	55,61	76,17	45,61	
	Realisasi	58,34	73,63	51,87	
	Deviasi	2,73	-2,54	5,86	
Progres Total Kumulatif Semua Seksi s/d Mg ke-85 (Tgl.26 Juni 2018)	Rencana	57,21			
	Realisasi	59,76			
	Deviasi	2,49			

Gambar 10. Contoh Hasil Risalah Rapat

4.10. Laporan Hasil Pendampingan Laik Fungsi Jalan dan Operasional Jalan

Sub bab ini khusus untuk pekerjaan yang sudah selesai dan akan dioperasikan, tetapi sebelum itu harus ada evaluasi laik fungsi dan operasionalnya. Evaluasi laik fungsi jalan tol diselenggarakan dalam rangka pemenuhan persyaratan aspek teknis, operasi, dan administrasi sebagai jalan tol yang berkeselamatan. Konsultan PMI harus melaporkan tahapan proses evaluasi ULF Jalan Tol ini, termasuk memonitor perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan ULF.

4.11. Laporan Khusus Kepada BPJT

Melampirkan laporan khusus yang diserahkan kepada BPJT dan BBPJJN terkait apabila terjadi kejadian penting yang mengganggu pelaksanaan konstruksi dalam waktu 24 jam setelah kejadian pada bulan tersebut dan memberikan rekomendasi atas kejadian tersebut.

4.12. Realisasi dan Rencana Kerja PMI

4.12.1. Realisasi Kegiatan PMI (Periode bulan berjalan)

Dalam setiap laporan, Konsultan PMI harus menguraikan dengan jelas kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh Konsultan PMI dalam Bulan pelaporan dan realisasi kegiatan yang sudah direncanakan pada laporan bulan sebelumnya. Konsultan PMI harus menjelaskan dengan detail apakah rencana dan realisasi sudah sesuai atautkah ada penambahan-penambahan kegiatan lainnya. Contoh sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Realisasi Kegiatan PMI

No	Uraian Pekerjaan		Pekan				Keterangan
			1	2	3	4	
1	Kunj Lapangan	Renc.					
		Real					
2	Uji Laborat	Renc					
		Real					
3	Rapat Mingguan	Renc					
		Real					
4	lainnya	Renc					
		Real					

4.12.2. Rencana Kerja PMI (Periode bulan berikutnya)

Dalam setiap laporan, Konsultan PMI juga harus menguraikan dengan jelas kegiatan-kegiatan apa saja yang direncanakan akan dilakukan pada bulan berikutnya. Konsultan PMI harus menjelaskan dengan detail apakah rencana kegiatan yang dimaksud. Contoh sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Rencana Kegiatan PMI

No	Uraian Pekerjaan		Pekan				Keterangan
			1	2	3	4	
1	Kunj Lapangan	Renc.					
		Real					
2	Uji Laborat	Renc					
		Real					
3	Rapat Mingguan	Renc					
		Real					
4	lainnya	Renc					
		Real					

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Menguraikan secara singkat padat dan jelas seluruh kegiatan PMI dalam bulan pelaporan yang dimaksud. Dapat dibuat dalam bentuk poin-poin.

5.2. Saran

Adapun saran dan masukan dari konsultan PMI dapat dituliskan pada sub bab ini.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Kurva S

[lampiran kurva s disertai penjelasan kurvanya apakah masih on track atau pekerjaan sudah terlambat atau bahkan malah pekerjaan sudah melebihi progress.]

2. Kegiatan Rapat dan Koordinasi

[Konsultan PMI harus melampirkan semua kegiatan-kegiatan rapat yang diadakan selama bulan pelaporan. Sub bab ini memuat data tentang rapat apa yang dilaksanakan, waktu, notulen, daftar hadir, pembahasan, dan dokumentasi]

3. Kegiatan Surat-Menyurat

[Laporan PMI harus melampirkan semua kegiatan surat-menyurat yang diadakan selama bulan pelaporan.

- Surat masuk
- Surat Keluar
- Laporan khusus kejadian penting *)

4. Dokumentasi

[Setiap kali konsultan PMI melakukan pengawasan di lapangan]



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGATUR JALAN TOL

Gedung Bina Marga Lantai 2 Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7258063, 7257126 Fax. (021) 7257126

Nomor : UM.01.02-PT.2/14
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian Notulen Rapat**

Jakarta, 18 April 2019

Kepada Yth.:

1. Kepala Subdit Pelaksanaan dan Pengendalian, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Ditjen Bina Marga;
2. Kepala Subdit Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Pembangunan Jalan, Ditjen Bina Marga;
3. Kepala Bidang Investasi, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol;
4. Direktur Pengembangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk;
5. Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero);
6. Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada;
7. Direktur Utama PT Marga Mandala Sakti;
8. Direktur Utama PT Waskita Toll Road;
9. Ir. Yayan Suryana, M.Eng.Sc.

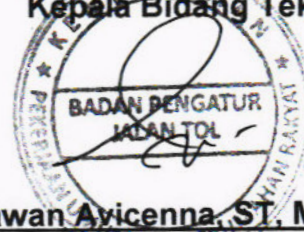
di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan rapat Pembahasan Diskusi *Working Group* Peningkatan Kinerja Konsultan Pengendali Mutu Independen dalam Pengendalian Kualitas Konstruksi Jalan Tol, pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 di Ruang Rapat Lantai 3 Badan Pengatur Jalan Tol, dengan ini kami sampaikan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretariat BPJT
Kepala Bidang Teknik,



Primawan Ayicenna, ST, MConstMgt
NIP. 19720618 200112 1 002

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (sebagai laporan);
2. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol.

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal	: Kamis, 18 April 2019
Pukul	: 10.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Rapat BPJT Gedung Bina Marga Lantai 3 Jalan Pattimura no. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Pemimpin Rapat	: Anggota Badan Pengatur Jalan Tol Unsur Profesi
Agenda	: Diskusi <i>Working Group</i> Peningkatan Kinerja Konsultan Pengendali Mutu Independen dalam Pengendalian Kualitas Konstruksi Jalan Tol
Peserta Rapat	: Daftar Hadir Terlampir

Telah dilaksanakan rapat pembahasan Diskusi *Working Group* Peningkatan Kinerja Konsultan Pengendali Mutu Independen dalam Pengendalian Kualitas Konstruksi Jalan Tol yang dipimpin oleh Anggota Badan Pengatur Jalan Tol Unsur Profesi, dan dihadiri oleh Subdit Pelaksanaan dan Pengendalian Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan (Ditjen JBHP), Subdit Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Pembangunan Jalan, Bidang Teknik Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Bidang Investasi Sekretariat BPJT, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Utama Karya (Persero), PT Citra Marga Nusaphala Persada, PT Marga Mandala Sakti, PT Waskita Toll Road, dan Ir. Yayan Suryana, M.Eng.Sc, dengan hasil sebagai berikut:

1. Secara prinsip, disepakati bahwa konsultan Pengendali Mutu Independen (PMI) diperlukan di lapangan dalam pengendalian kualitas mutu konstruksi dan pemenuhan target waktu penyelesaian konstruksi jalan tol.
2. Diperlukan penyamaan persepsi terhadap penugasan konsultan PMI, dimana keberadaannya di lapangan adalah sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian. Sehingga diharapkan konsultan PMI dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam kerangka acuan kerja, serta membantu BUJT dalam mengawal pelaksanaan konstruksi.
3. Beberapa hal yang disepakati untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja konsultan PMI di lapangan antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Diperlukannya penjabaran akan keberadaan termasuk lingkup tugas dan tanggung jawab konsultan PMI, yang dituangkan di dalam dokumen kontrak BUJT dengan kontraktor serta konsultan pengawas (supervisi), termasuk peran dan tugas masing-masing pihak pelaksana konstruksi sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
 - b. Tata cara pengadaan konsultan PMI untuk dilakukan dengan metode pelelangan umum (azas terbuka dan transparan), sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan. Adapun pelaksanaannya diharapkan dapat bersamaan dengan proses pengadaan jasa kontraktor dan konsultan supervisi. Sehingga diharapkan pelaksanaan tugasnya dapat dimulai secara bersamaan.
 - c. Pelaksanaan pendanaan dan pembayaran konsultan PMI diusulkan untuk tetap dilaksanakan oleh BUJT dengan besaran minimal *billing rate* berdasarkan tahun pengalaman tenaga ahli ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Sebelum tenaga ahli dimobilisasi, BPJT harus memberikan informasi atas lingkup, tugas, fungsi, serta penjelasan lain yang diperlukan, termasuk pemahaman bahwa pendanaan jasa konsultasi melalui BUJT adalah merupakan bagian dari investasi perusahaan jalan tol.

- e. Diperlukan adanya *project management manual* yang menjabarkan lingkup tugas, tata cara, dan tahapan pelaksanaan dalam unit organisasi proyek konstruksi dapat berjalan dengan baik.
4. Untuk selanjutnya, rapat pembahasan berikutnya akan melibatkan PIC dari Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) dan BPJT yang ditunjuk guna mendapatkan masukan dalam rangka peningkatan kinerja konsultan PMI.

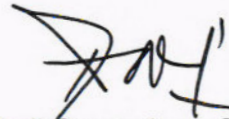
Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Bidang Teknik



Primawan Avicenna ST, M.Const.Mgt
NIP 19720618 200112 1 002

Notulis,



Hadi Suprayitno, ST, MT
NIP 19821120 200912 1 001

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum

DAFTAR HADIR

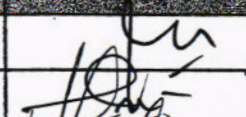
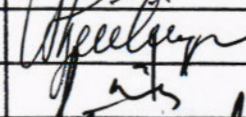
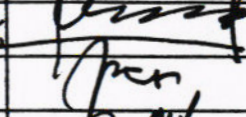
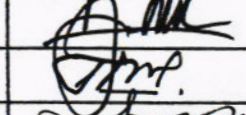
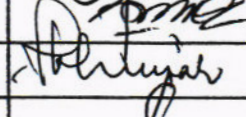
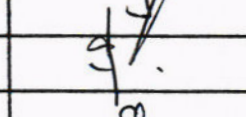
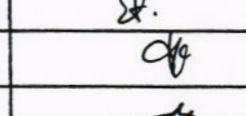
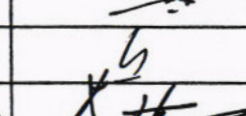
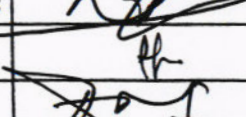
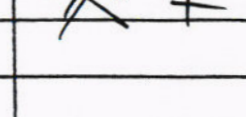
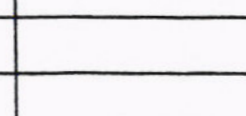
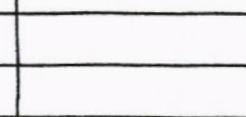
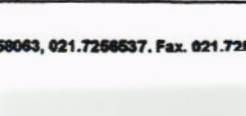
Hari, Tanggal : Kamis, 18 April 2019

Waktu : 10.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat BPJT Lantai 3

Agenda : Diskusi Pembentukan Working Group Peningkatan Kinerja
Konsultan PMI dalam Pengendalian Kualitas Konstruksi Jalan Tol

Pemimpin Rapat :

NO.	NAMA	INSTANSI	NO. TLP / HP	TANDA TANGAN
1.	KOENTJATJYO	BPJT		
2.	Primananda Ananta	Set BPJT		
3.	Sadaarih Gintiry	Subdit PE, Dit. Bay		
4.	A. Fajarwanho	HK	081325006868	
5.	BAGUS Muel	CKUP	0811274233	
6.	Arie Inianto	JM		
7.	J. MANCELLY	JM		
8.	Acus Sutarjanto	JM		
9.	Thani Haryanto	JM	0819-706170	
10.	Iwan Hurnaryat	WTR	0812-4932984	
11.	Yayan Suryana		0812-8665609	
12.	D. WIMANTO	CMNP & CW	0811162201	
13.	Ermy Luspa. Y	WTR	081389888844	
14.	Ratu Intan	Set. BPJT	081390682820	
15.	Endri Wahyudi	Subdit PP JBR	727 93787	
16.	Soegihono			
17.	Ch. Kornel M.T.S	BPJT	08119770764	
18.	Ferdiansyah.	Set BPJT		
19.	Hadi Suprayatno	Set. BPJT		



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGATUR JALAN TOL

Gedung Bina Marga Lantai 2 Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7258063, 7257126 Fax. (021) 7257126

Nomor : UM.01.02 - Pt/136
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 16 April 2019

Kepada Yth. :
(Daftar Undangan Terlampir)

Di

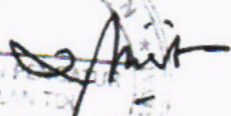
Tempat

Sehubungan dengan upaya peningkatan kinerja Konsultan Pengendali Mutu Independen, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada rapat pembahasan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 April 2019
Waktu : Pukul 10.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat BPJT, Gedung Bina Marga Lantai 3
Jalan Pattimura no.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Agenda : Diskusi pembentukan *Working Group* Peningkatan Kinerja Konsultan Pengendali Mutu Independen dalam Pengendalian Kualitas Konstruksi Jalan Tol

Berkenaan dengan hal tersebut, para Badan Usaha Jalan Tol diminta untuk menyampaikan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan tugas Konsultan Pengendali Independen pada ruas Jalan Tol Konstruksi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris BPJT,

Ir. Abram Elsajaya Barus, M. Eng.Sc
NIP. 19660715 199603 1 007

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (sebagai laporan);
2. Direktur Pembangunan Jalan, Ditjen Bina Marga;
3. Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Ditjen Bina Marga.

Lampiran Surat Sekretaris BPJT

Nomor : UM.01.02 - Pt/136

Tanggal : 16 April 2019

DAFTAR UNDANGAN

1. Para Anggota Badan Pengatur Jalan Tol;
2. Kepala Subdit Pelaksanaan dan Pengendalian Jalan Bebas Hambatan, Ditjen Bina Marga;
103. Kepala Subdit Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jalan , Ditjen Bina Marga;
4. Kepala Bidang Teknik, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol;
5. Kepala Bidang Investasi, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol;
6. Direktur Pengembangan PT Jasa Marga (persero) Tbk;
7. Direktur Utama PT. Utama Karya (persero);
8. Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada;
9. Direktur Utama PT Marga Mandala Sakti;
10. Direktur Utama PT Waskita Toll Road
11. Ir. Yayan Suryana, M.Eng.Sc;
12. Ir. Richard Napitupulu
13. Tim Bantek Bidang Teknik, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.